

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

KJP Plus Janganlah Putus

JAKARTA-Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menghentikan pendistribusian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi penerima yang memenuhi kriteria. Pendistribusian KJP Plus di tengah pandemi Corona jadi hal penting. Disamping karena manfaat subsidi pangan murah yang didapat warga, juga bagian janji politik sang gubernur.

"Karena itu keberlangsungan KJP Plus jangan sampai terputus. Ini bagian dari janji pak gubernur. Stok pangan harus tetap aman di ibu kota," ungkap Suhaimi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Politikus PKS ini berharap Anies dan jajarannya konsisten memberikan KJP Plus kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria penerima bantuan. "KJP (Plus) harus tetap berjalan di saat susah seperti ini," jelasnya.

Manfaat pemegang KJP Plus yakni *pemilainya* bisa membeli pangan murah yang disediakan Pemprov DKI. Di antaranya beras 5 kg seharga Rp30 ribu, daging sapi Rp35 ribu per kilogram, daging ayam Rp8 ribu per kilogram, ikan kembung Rp13 ribu per kilogram, telur ayam Rp10 ribu per 15 butir, dan susu UHT Rp30 ribu per dus isi 24 buah.

PSBB Tanggung

Ketua Komisi A DPRD DKI Muji-



Ini bagian dari janji pak gubernur. Stok pangan harus tetap aman di ibu kota." Abdurrahman

Suhaimi

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

yono menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap sebagai kebijakan tanggung jika tujuannya mengentaskan wabah virus Corona bagi ibu kota.

"Lagi-lagi apakah itu efektif apa nggak. Soalnya kebijakan PSBB ini nanggung," kata Mujiyono saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020). Pasalnya menurut dia, PSBB sesungguhnya cuma mengandalkan kesadaran masyarakat untuk patuh mengikuti aturan pemerintah.

Masyarakat *diminta* untuk patuh terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, dengan tujuan memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun tidak semua pihak disiplin melakukan apa yang diinginkan pemerintah.

Mereka terpaksa keluar rumah demi menyambung hidup. Sampai di situ, jadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan permasalahan risiko ekonomi yang

terjadi, utamanya berkenaan dengan masalah perut.

"Karena (PSBB) mengandalkan kesadaran masyarakat. Masyarakat kita, kalau lagi kondisi begini harusnya strenght, nggak boleh ya nggak boleh. Tapi saat terjadi risiko sosial ekonomi masalah perut, tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Dalam upaya membantu menyelesaikan persoalan pandemi ini, DPRD DKI tengah menyusun formula soal pelaksanaan PSBB yang lebih efektif ketimbang penerapan Pemprov DKI selama 11 hari ke belakang. "Saya juga lagi nyusun formula gimana PSBB ini jadi lebih efektif, sebagai hasil pembicaraan DPRD," pungkasnya.

Mujiyono mengatakan ada beberapa hal masih perlu evaluasi dalam PSBB. "Pasar masih rame, nggak terapkan social distancing, jalanan masih macet," ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Demokrat tersebut.

Pihak eksekutif juga diminta tegas tanpa mengurangi sisi humanis dalam penegakkan aturan di lapangan. Seperti ketika menegakkan aturan kepada jenis perusahaan yang tidak dikecualikan dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020.

Politikus Demokrat ini meminta Pemprov DKI dapat tegas memberi efek jera bagi perusahaan yang membandel. Soal wacana perpanjangan PSBB, Mujiyono menyarankan Gubernur Anies Baswedan dapat mengevaluasi pelaksanaannya bersama DPRD DKI. "Nah katanya mau diperpanjang. Sebelum perpanjang harusnya dievaluasi dulu dong. Dan DPRD diajak ngomong dong," cetusnya.

Swab Test

DPRD DKI merespon positif rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk swab test. Sejauh ini metode rapid test yang gencar dilakukan.

"Infonya itu (tes swab) akan dilakukan, saya kira itu langkah positif," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI. Pemprov DKI diminta lebih reaktif dalam melindungi warga di saat pandemi Covid-19 ini. Apalagi, dana Pemprov DKI ada dan sumber daya manusia yang dimiliki juga lebih baik.

"Jadi semua lebih lah Jakarta ini,

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

KJP Plus Janganlah Putus

tinggal bagaimana kita tanggalkan kepentingan di luar ini," kata dia. Gembong juga menyarankan agar Pemprov DKI mau berkolaborasi dengan semua pihak, terutama pemangku kepentingan. Dia menilai sekarang sudah saatnya duduk bersama untuk mengentaskan wabah Covid-19.

"Contoh, bagaimana realokasi anggarannya, apakah ada kendala. Harus segera kita bicarakan dalam rangka untuk bisa mengatasi ini bersama," kata dia. Sebelumnya, Anies mengaku lebih mendukung tes reaksi berantai polimerase (PCR) atau swab test untuk mengecek virus Corona dibandingkan rapid test. PCR dianggap lebih akurat.

"Rapid test punya potensi keliru cukup tinggi makanya kita dorong ke tes PCR," kata Anies.

PCR dan rapid test disebut memiliki perbedaan menonjol. Dalam rapid test, sampel darah seseorang diambil untuk mengukur antibodinya, bukan untuk mendeteksi virus Corona.

Manfaatkan Rusun

Komisi E DPRD DKI yang membicarakan pendidikan, keberatan adanya usulan gedung sekolah digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi tenaga medis dan pasien positif Covid-19. Dia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI memanfaatkan

kan rumah susun yang masih kosong.

"Kita sih barusan sampaikan ke Pak Wagub bahwa coba itu ditinjau lagi supaya lebih spesifik lagi diutamakan jangan langsung ke sekolah dulu kan itu masih banyak Rusun yang kosong," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, kepada merdeka.com, Selasa (21/4).

Iman menolak gagasan tersebut karena area sekolah dekat atau bahkan berada di tengah-tengah pemukiman warga. Tak dipungkiri, katanya, saat ini masih banyak warga yang menolak segala hal berkaitan dengan Covid-19.

Iman menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menyediakan hunian vertikal sebagaimana telah diberikan Pemprov kepada tenaga medis yaitu hunian sementara di Hotel Grand Cempaka.

Jika membutuhkan tempat yang lebih besar, Iman mengusulkan memanfaatkan stadion utama. "Masih banyak. Bisa itu dimanfaatkan, kalau memang perlu kalau saya coba aja stadion utama. Stadion utama itu ubah aja gitu jadi kamar-kamar kan bagus," usulnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan data sejumlah sekolah yang akan difungsikan sebagai tempat tinggal tenaga medis dan isolasi pasien terkait virus Corona atau Covid-19 masih berbentuk usulan saja. (dni)